



Sulit Mengurai Kerumunan

Warga Diminta Membatasi Mobilitas

KASUS COVID-19 MENGGELIAT

- Tren peningkatan kasus Covid-19 pun terjadi di DIY.
- Mobilitas warga yang sulit dibendung ditengarai menjadi satu penyebab. Ditambah lagi penerapan prokes yang longgar turut menyumbang faktor risiko.
- Pemda DIY tak akan memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat.
- Pemerintah tengah mengkaji kebijakan PPKM yang dijadwalkan berakhir pada 4 Juli.
- Penambahan penularan secara nasional pada 3 Juli 2022 mencapai 1.614 kasus.

GRAFIS/FAUZIA RAHMAN

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah menarik kebijakan pelonggaran pemakaian masker di luar ruangan. Hal itu dilakukan karena adanya lonjakan kasus Covid-19 di tingkat nasional. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengungkapkan, kebijakan itu dinilai tepat mengingat tren kenaikan kasus juga dirasakan di DIY. Selain itu, saat ini juga ditemui banyak kerumunan akibat adanya penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

• ke halaman 11



Kekhawatiran (kasus naik) masih ada, kita tetap khawatir karena kehadiran mereka (wisatawan) menimbulkan kerumunan.

Sulit Mengurai Kerumunan

• Sambungan Hal 1

yang diikuti berbagai macam pelonggaran aktivitas masyarakat.

Selain tetap mengenakan masker, masyarakat juga diimbau untuk mengurangi mobilitasnya jika tidak ada kepentingan yang mendasak. Terlebih saat ini telah memasuki musim libur sekolah, sehingga banyak wisatawan yang menyambangi wilayah ini.

"Selain pakai masker, saya kira masyarakat DIY perlu berjaga-jaga. Kalau enggak ada kepentingan mendesak, lebih baik di rumah saja. Itu untuk mengurangi kepadatan dan kerumunan," terang Aji, Minggu (3/7). "Kekhawatiran (kasus naik) masih ada, kita tetap khawatir karena kehadiran mereka (wisatawan) menimbulkan kerumunan," sambungnya.

Menurut mantan Kepala Disdikpora DIY ini, meski kebijakan pelonggaran pemakaian masker sempat diberlakukan, masyarakat DIY disebut telah memiliki kesadaran yang baik. Hal itu terlihat di kawasan Ma-

lioboro yang menurut amannya, mayoritas wisatawan di sana memilih tetap memakai masker. "Hanya masalah kerumunan saja yang saat ini sulit ditangani," terangnya.

Pemda DIY, lanjutnya, tidak akan memberlakukan pembatasan mobilitas meski kasus positif mengalami tren kenaikan. Sebab kebijakan itu diputuskan oleh pemerintah pusat melalui kebijakan PPKM.

Saat ini pemerintah tengah mengkaji kebijakan PPKM yang dijadwalkan berakhir pada 4 Juli 2022 mendatang. Tak menutup kemungkinan pemerintah akan kembali memperketat penerapan protokol kesehatan di sejumlah daerah yang mengalami kenaikan kasus. "Apa pun hasilnya kami pemerintah daerah siap mengikuti," tandasnya.

Proporsional

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menuturkan, Pemda DIY perlu menyikapi kenaikan kasus Covid-19 ini secara proporsional. Yakni dengan memperhatikan keberlangsungan ekonomi dan penerapan protokol kesehatan di tempat publik.

"Menurut saya kita sikapi proporsional saja. Prokes kita ikuti sesuai ketentuan dengan masker dan hal yang

memungkinkan. Aktivitas ekonomi tetap saja dijalankan sebaik-baiknya dengan menjaga protokol kesehatan," jelas Huda, Minggu (3/7).

Menurutnya, penanganan Covid-19 saat ini kurang sesuai jika dilakukan dengan pendekatan kebencanaan. Melainkan lebih tepat jika menggunakan langkah antisipatif karena masyarakat telah mengenal Covid-19 dan memiliki kesadaran yang baik terkait penerapan protokol kesehatan.

Sehingga, opsi penerapan pembatasan sosial kini bukan menjadi solusi utama karena membutuhkan banyak anggaran dan dapat melumpuhkan ekonomi masyarakat. "Kita sikapi Covid ini dengan manajemen yang terukur antisipatif, jangan dengan manajemen kebencanaan, karena Covid-19 ini sudah kita kenal. Jika pakai manajemen kebencanaan jadi mahal dan kurang tepat," terangnya.

Meski demikian, Pemda DIY juga harus memperhatikan kesiapan sistem kesehatan jika terjadi lonjakan kasus sewaktu-waktu. Seperti keberadaan tenaga kesehatan, selter isolasi, dan tenaga kesehatan.

"Sistem kesehatan kita juga disiagakan, saat ini sistem kesehatan di DIY dari

nakes, peralatan, dan sebagainya jauh lebih siap," terangnya. "Jadi kita sikapi proporsional, hati-hati tapi jangan menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sebagainya," sambungnya.

Tembus seribu

Pemerintah melaporkan penambahan 1.614 kasus Covid-19 di Indonesia dalam 24 jam terakhir, Minggu (3/7). Penambahan kasus itu tersebar di 20 provinsi. Dengan penambahan kasus tersebut, total kasus konfirmasi Covid-19 di Tanah Air berjumlah 6.093.917 orang.

Menurut data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, penambahan kasus tertinggi ada di DKI Jakarta dengan 931 kasus. Kemudian, pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 1.606 orang, sehingga jumlahnya menjadi 5.920.249 orang.

Di sisi lain, ada penambahan empat kasus kematian akibat Covid-19. Dengan demikian, total pasien Covid-19 meninggal dunia jadi 156.749 orang. Sementara itu, angka *positivity rate* kasus positif Covid-19 harian yaitu 5,14 persen. Namun, jika hanya berdasarkan tes *swab* PCR dan TCM, maka *positivity rate* sebesar 14,53 persen. (tro/kpc)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Ketertiban 3. Dinas Pariwisata 4. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 5. Kundha Kabudayan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005